

Peran Kebijakan Fiskal

Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Sosial

Author :

Sri Wulan Maulani¹, Shakila Oktarini², Aditya Pratama Purwadita³

Affiliation:

Department of Public Administration Universitas Negeri Yogyakarta, Karang Malang,
Caturtunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55281.¹²³

Email:

sriwulan.2023@student.uny.ac.id¹, shakila8031fishipol.2023@student.uny.ac.id²,
aditya7521fishipol.2023@student.uny.ac.id³

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of fiscal policy in addressing social inequality, unemployment, and fostering inclusive economic growth in Indonesia. A descriptive qualitative method was employed to explore the roles of progressive tax systems, social transfer programs, and infrastructure investments. The findings reveal that while policies like the Family Hope Program (PKH) positively impact societal welfare, the effectiveness of income redistribution remains limited. Economic inequality persists, as indicated by the Gini coefficient, which reached 0.409 in 2023. Infrastructure plays a crucial role in reducing disparities and creating economic opportunities, especially in underdeveloped regions. The conclusion emphasizes the need for enhanced oversight, transparency, and inclusivity in fiscal policy implementation to ensure its benefits are experienced by all segments of society.

Keywords: Fiscal policy, social inequality, unemployment, inclusive development, infrastructure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan sosial, pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi peran sistem pajak progresif, program transfer sosial, dan investasi infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, efektivitas redistribusi pendapatan masih terbatas. Ketimpangan ekonomi terus meningkat, terlihat dari koefisien Gini yang mencapai 0,409 pada tahun 2023. Infrastruktur berperan krusial dalam mengurangi ketimpangan dan menciptakan peluang ekonomi, terutama di daerah tertinggal. Kesimpulan menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan, transparansi, dan inklusivitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan fiskal, ketimpangan sosial, pengangguran, pembangunan inklusif, infrastruktur

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Instrumen ini memungkinkan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara guna mencapai berbagai tujuan pembangunan, baik ekonomi maupun sosial. Di tengah tantangan global dan domestik yang terus berkembang, kebijakan fiskal memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal telah menjadi tulang punggung upaya pemerintah untuk menghadapi masalah ketimpangan sosial, pengangguran, serta kebutuhan investasi di sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu fungsi utama kebijakan fiskal adalah sebagai alat untuk menggerakkan perekonomian. Dengan mengalokasikan dana pada proyek-proyek infrastruktur berskala besar, pemerintah tidak hanya mempercepat pembangunan fisik tetapi juga membuka peluang kerja yang luas, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong aktivitas ekonomi lainnya. Begitu pula pada sektor sosial, pengeluaran negara untuk program pendidikan dan kesehatan bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan melalui subsidi dan program perlindungan sosial yang ditujukan bagi kelompok masyarakat rentan.

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dalam situasi ketika ekonomi global menghadapi perlambatan. Peningkatan belanja pemerintah di sektor-sektor strategis tidak hanya mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tetapi juga membantu menciptakan stabilitas ekonomi makro. Di sisi lain, kebijakan fiskal juga berfungsi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan. Upaya ini dilakukan melalui redistribusi sumber daya yang lebih merata dan pengembangan layanan publik yang mudah diakses oleh semua kalangan, khususnya kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah. Namun, implementasi kebijakan fiskal di Indonesia tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah risiko defisit anggaran yang dapat membebani keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Ketergantungan pada utang luar negeri untuk mendanai defisit juga meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global. Selain itu, inflasi yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mengancam daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal perlu dirancang secara hati-hati dengan mempertimbangkan koordinasi yang erat dengan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Di samping tantangan teknis, efektivitas kebijakan fiskal juga bergantung pada aspek implementasi. Kebijakan yang tidak tepat sasaran atau alokasi anggaran yang tidak efisien dapat mengurangi dampak positif yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta transparansi dalam pelaksanaan kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh

lapisan masyarakat. Pendekatan yang inklusif dalam merancang kebijakan juga penting untuk memastikan bahwa berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang rentan, mendapatkan manfaat dari pengeluaran pemerintah. Dengan mengelola tantangan dan memaksimalkan potensi, kebijakan fiskal dapat menjadi katalis utama dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, kebijakan fiskal yang dirancang dan diimplementasikan secara efektif dapat membantu Indonesia mencapai visi pembangunan yang lebih inklusif, merata, dan tangguh di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. Sehingga tujuan penelitian ini terletak pada upaya melihat kebijakan fiskal bukan hanya dalam dimensi parsial seperti infrastruktur, pendidikan, atau program sosial, tetapi secara multisektor dan integratif. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menekankan pentingnya integrasi kebijakan fiskal lintas sektor sebagai landasan pembangunan inklusif. Pendekatan ini memberikan kontribusi orisinal bagi literatur kebijakan fiskal, karena menyoroti perlunya kesinambungan antara transfer sosial, pemerataan layanan publik, pembangunan infrastruktur berkeadilan, serta industrialisasi berbasis UMKM, sehingga hasil kebijakan fiskal tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga secara nyata mempersempit ketimpangan sosial-ekonomi.

Menurut Fildzah DM, Rebecka Tri TP, Rizki SM, Eko WN, Muammar R dalam jurnal mereka yang berjudul “Peran Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian di Indonesia” Kebijakan fiskal berperan sebagai sarana utama dalam mencapai tujuan ekonomi suatu negara. Hal ini mencakup peningkatan lapangan kerja, pemerataan pendapatan nasional, peningkatan investasi, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi. Selain itu, dalam menghadapi resesi, kebijakan fiskal juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan.

Dalam jurnal yang berjudul “Analysis of the Impact of Government Fiscal and Monetary Policies on Economic Growth in Indonesia: Government Economic Approach” yang ditulis oleh Hanipah, H., Sugiartini, P., & Maula, I menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, terutama pengeluaran pemerintah untuk proyek infrastruktur dan program sosial, memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan fiskal dan moneter digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi negara.

Seperti yang ditulis dalam jurnal “Fiscal Policy, Monetary Policy and Economic Growth in Indonesia” oleh Diah Retnowati studi ini menganalisis dampak kebijakan fiskal (pajak dan pengeluaran pemerintah) serta kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pajak memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pengeluaran pemerintah, inflasi, dan nilai tukar memiliki efek negatif.

Salah satu fungsi utama kebijakan fiskal adalah mengurangi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi pendapatan. Sistem pajak progresif dan program transfer sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bertujuan untuk mendukung kelompok rentan. Haliim dan Purba (2021) mencatat bahwa PKH meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima hingga 4,8% serta mendukung kualitas

pendidikan dan kesehatan, meskipun terdapat kendala seperti kesalahan penargetan dan cakupan yang terbatas.

Selain itu, investasi dalam infrastruktur juga berperan dalam pemerataan ekonomi. Indrawati et al. (2024) mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik dan digital meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, menciptakan peluang ekonomi baru, dan membuka lapangan kerja, khususnya di daerah tertinggal.

Dalam mengatasi pengangguran, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja melalui investasi pada sektor padat karya seperti manufaktur dan pertanian. Afriyie (2019) menekankan bahwa insentif pajak dan subsidi dapat meningkatkan produksi dan penyerapan tenaga kerja, sementara dukungan terhadap UMKM berkontribusi signifikan pada pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, program pelatihan keterampilan yang didanai pemerintah membantu tenaga kerja beradaptasi dengan kebutuhan pasar, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan menekan angka pengangguran.

Pendekatan inklusif dalam kebijakan fiskal bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Menurut International Monetary Fund (IMF), kebijakan fiskal yang dirancang dengan baik dapat mendukung pertumbuhan inklusif melalui program pengeluaran dan kebijakan pajak yang tepat.

Selain itu, desain pajak yang efisien dan adil memainkan peran penting dalam mencapai pertumbuhan inklusif. Studi lain menekankan bahwa kualitas institusi dan kebijakan fiskal yang efektif berkontribusi signifikan terhadap proses pertumbuhan inklusif di negara-negara berkembang.

Pendekatan inklusif dalam kebijakan fiskal bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023), kebijakan fiskal difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Investasi dalam infrastruktur memiliki peran krusial dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Akses yang lebih baik ke air bersih dan sanitasi, misalnya, dapat mengurangi angka kematian anak dan meningkatkan kesejahteraan umum. Selain itu, akses ke listrik memungkinkan waktu belajar yang lebih lama bagi siswa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa investasi difokuskan pada komunitas yang paling membutuhkan, termasuk mereka yang secara historis terpinggirkan.

Studi lain yang dilakukan oleh Timilsina et al (2023) menemukan hubungan positif antara infrastruktur fisik dan pertumbuhan ekonomi, meskipun dengan variasi dalam tingkat pengaruhnya. Di kawasan Afrika Timur, pengembangan infrastruktur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)

menyoroti bahwa kebijakan lokal yang efektif dapat mendukung penciptaan lapangan kerja, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi.

Selain itu, penelitian oleh International Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa beberapa negara berhasil menciptakan lapangan kerja lebih banyak dibandingkan negara lain, dengan analisis yang berfokus pada perbedaan dalam kebijakan dan praktik. Studi lain yang dilakukan oleh world bank (2020) menekankan pentingnya kebijakan persaingan dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan transformasi ekonomi.

METODE

Metode pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan analisis kebijakan berbasis data sekunder yang berfokus pada pengumpulan data yang bersifat naratif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai beberapa fenomena yang menjadi objek kajian. Dalam konteks kebijakan fiskal dan moneter, metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap berbagai aspek ekonomi dan sosial. Peneliti menggunakan analisis dokumen dengan mensintesisnya untuk mendapatkan temuan untuk digali lebih dalam mengenai dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah kemampuannya untuk menangkap nuansa kompleks dari fenomena yang sedang diteliti, seperti perubahan sosial atau ekonomi yang dihasilkan oleh kebijakan fiskal dan moneter.

Data yang diperoleh bukan hanya angka-angka atau statistik, tetapi juga pemahaman mengenai persepsi, pengalaman, dan interaksi antar individu atau kelompok yang terlibat. Proses sintesis dari literatur yang ada yaitu dengan analisis tematik menggunakan beberapa tema besar terkait kebijakan fiskal, literatur yang didapat dilakukan seleksi berdasarkan tema analisis dan data yang didapat nantinya akan dilakukan triangulasi. Oleh karena itu, metode ini sangat berguna dalam studi kebijakan ekonomi yang melibatkan dampak sosial, ketidaksetaraan, atau perubahan perilaku masyarakat sebagai respon terhadap kebijakan yang diterapkan.

HASIL DAN DISKUSI

Ketimpangan ekonomi di Indonesia dapat dilihat melalui Indeks Gini, yang mencerminkan distribusi pendapatan dalam populasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Gini meningkat dari 0,381 pada September 2021 menjadi 0,384 pada Maret 2022, dan mencapai 0,388 pada 2023, mendekati level 0,409 pada puncak pandemi. Meskipun tingkat kemiskinan menurun dari 10,19% (2020) menjadi 9,36% (2023), distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi tetap timpang. Ketimpangan desa-kota juga terlihat jelas, dengan Gini Ratio perkotaan 0,403 dibanding perdesaan 0,313 (BPS, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif, melainkan cenderung menguntungkan kelompok menengah ke atas, terutama melalui kebijakan fiskal yang bias seperti pengurangan pajak barang mewah, sementara pengurangan subsidi energi justru meningkatkan beban hidup kelompok berpendapatan rendah.

Kebijakan fiskal di Indonesia dirancang untuk mengurangi ketimpangan melalui instrumen pajak progresif dan program transfer sosial. Namun, efektivitasnya masih terbatas. Beberapa studi (World Bank, 2022; Rahmawati & Nuryanto, 2021) menegaskan bahwa kontribusi pajak progresif terhadap redistribusi di Indonesia jauh lebih kecil dibanding negara-negara OECD. Program transfer sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), memang berkontribusi pada penurunan kemiskinan misalnya meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima sebesar 4,8% tetapi dampaknya pada penurunan ketimpangan pendapatan masih relatif kecil. Tantangan utama meliputi masalah penargetan, manfaat yang rendah, dan lemahnya integrasi dengan penyedia layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, meski kebijakan fiskal bersifat protektif, ia belum menyentuh akar struktural ketimpangan.

Pendidikan dan kesehatan, yang seharusnya menjadi instrumen mobilitas sosial, masih menunjukkan ketidakmerataan. Program Indonesia Pintar berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi kualitas layanan pendidikan masih timpang antara perkotaan dan daerah 3T. Hal serupa juga terjadi pada sektor kesehatan. Meskipun cakupan BPJS meningkat, akses terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Kesenjangan kualitas ini berpotensi mereproduksi ketimpangan antargenerasi, karena anak-anak dari keluarga miskin cenderung tidak memperoleh kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja modern.

Investasi infrastruktur sejak 2015 memberikan kontribusi signifikan pada konektivitas ekonomi. Jalan tol, bandara, dan pelabuhan baru terbukti menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi barang. Namun, distribusinya masih bias pada wilayah dengan potensi ekonomi tinggi seperti Jawa dan Sumatera. Studi Asian Development Bank (2021) menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif bagi wilayah tertinggal justru memperlebar disparitas antarwilayah. Hal ini berpotensi menciptakan dualisme ekonomi, di mana sebagian wilayah maju pesat sementara wilayah lain tetap terpinggirkan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus diarahkan tidak hanya pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan spasial.

Masalah pengangguran juga terkait erat dengan ketimpangan. Tingkat pengangguran terbuka memang turun dari 6,26% (2021) menjadi 5,32% (2023), tetapi sebagian besar pekerjaan masih berada di sektor informal dengan produktivitas rendah. UMKM yang menyumbang lebih dari 60% PDB memiliki peran penting dalam distribusi pendapatan, namun keterbatasan akses modal, digitalisasi, dan kapasitas manajerial membuat perannya dalam mengurangi ketimpangan belum optimal. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang memperluas akses pembiayaan, tetapi tanpa pendampingan dan integrasi ke rantai nilai industri, dampaknya terbatas. Dengan demikian, strategi pemberdayaan UMKM seharusnya tidak hanya berbasis akses modal, tetapi juga penguatan kapasitas produksi, digitalisasi, dan kemitraan dengan industri besar.

Secara sintesis, kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan masih bersifat parsial:

transfer sosial mengurangi kemiskinan tetapi tidak mengubah struktur ekonomi; pendidikan dan kesehatan memperluas akses tetapi tidak menjamin kesetaraan kualitas; infrastruktur mempercepat pertumbuhan tetapi bias spasial; dan UMKM didukung modal namun minim integrasi industri. Ketimpangan yang multidimensional ini menuntut pendekatan lintas sektor. Dengan kata lain, tantangan utama bukan sekadar efektivitas teknis kebijakan, melainkan keterputusan antarstrategi pembangunan. Ke depan, arah kebijakan yang lebih relevan adalah pembangunan inklusif yang menekankan integrasi fiskal dengan industrialisasi berbasis UMKM, pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang adil secara spasial. Hanya dengan demikian pengurangan ketimpangan dapat menjadi hasil nyata, bukan sekadar retorika politik.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal di Indonesia memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, namun efektivitasnya masih terbatas karena penerapannya cenderung parsial. Instrumen seperti pajak progresif, program transfer sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan dukungan UMKM memang memberikan dampak positif, tetapi belum mampu menyelesaikan akar ketimpangan yang bersifat multidimensional. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transfer sosial dapat menekan kemiskinan namun tidak mengubah struktur ekonomi; pendidikan dan kesehatan memperluas akses tetapi kualitasnya timpang; infrastruktur mempercepat pertumbuhan tetapi bias secara spasial; sementara dukungan terhadap UMKM terbatas karena minim integrasi dengan rantai nilai industri.

Dengan demikian, arah kebijakan fiskal ke depan tidak hanya perlu menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga memastikan adanya sinergi antara redistribusi sosial, pemerataan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan spasial, serta penguatan UMKM melalui industrialisasi inklusif. Jika dikelola dengan integrasi lintas sektor yang baik, kebijakan fiskal dapat benar-benar menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan pembangunan inklusif, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, dan memperkuat daya saing Indonesia di tengah dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyie, P. O. (2019). Small and medium scale enterprises and job creation. *The International. Journal of Business & Management*, 7(8). <https://doi.org/10.24940/theijbm/2019/v7/i8/bm1908-044>
- Dauda, Seidu (2020) *The Effects of Competition on Jobs and Economic Transformation* (English). Washington, D.C. : World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/360861602285878538/The-Effects-of-Competition-on-Jobs-and-Economic-Transformation>
- Day, J., de Mello, L., & Ter-Minassian, T. (2024). Managing rising subnational fiscal risks (OECD Working Papers on Fiscal Federalism, No. 46). OECD.

- Fakhrurraji, A., Prasetyono, P., & Musyarofah, S. (2019). The problem with state finance planning and budgeting in higher education. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(1). <https://doi.org/10.52728/ijss.v4i1.433>
- Emma Hooper, Sanjay Peters, Patrick A. Pintus. (2020). The Impact of Infrastructure Investments on Income Inequality: Evidence from US States. *Ffhalshs-02736095v2f*
- Ernawati, E., Tajuddin, T., & Nur, S. (2021). Does government expenditure affect regional inclusive growth? An experience of implementing village fund policy in Indonesia. *Economies*, 9(4), 164. <https://doi.org/10.3390/economies9040164>
- Ernst, Ekkehard; Merola, Rossana; Reljic, Jelena (2024) : Fiscal policy instruments for inclusive labour markets: A review, GLO Discussion Paper, No. 1406, Global Labor Organization (GLO), Essen
- Ghifari, D. (2024, November 29). Inequality increases slightly as poverty declines in Indonesia. *Asia News Network*. <https://asianews.network/inequality-increases-slightly-as-poverty-declines-in-indonesia/>
- Hallaert, J.-J., & Primus, K. (2022). Strengthening public expenditure efficiency: Investment and social spending in Bulgaria. *World Bank*. <https://doi.org/10.1596/9798400210273>
- Haliim, W., & Purba, D. (2021). Social and bureaucratic problems in social policy implementation in Indonesia: A study on the program Keluarga Harapan (PKH). *Mediasosian*, 7(1). <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4533>
- Hanipah, H., Sugiartini, P., & Maula, I. M. (2023). Analysis of the impact of government fiscal and monetary policies on economic growth in Indonesia: Government economic approach. *Journal of Social Research*, 2(11). <https://doi.org/10.55324/josr.v2i11.1498>
- Hitch, A. (2021, March 3). Tackling inequality by investing in infrastructure. *The Chicago Council of Global Affairs*. <https://www.thechicagocouncil.org/commentary-and-analysis/blogs/international-insights/tackling-inequality-investing-in-infrastructure>
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurrohman. (2024). Indonesia's fiscal policy in the aftermath of the pandemic. *The Journal of Development Studies*, 1-33. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>
- Independent Evaluation Office of the IMF. (2023). IMF advice on fiscal policy. *International Monetary Fund*. <https://www.imo-imf.org/en/reports/2023/0623-IMF-advice-on-fiscal-policy>
- Kementerian Keuangan. (2023). Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023*.

- OECD (2014). Job Creation and Local Economic Development, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264215009-en>.
- OECD. (2023, January 18). Revenue impact of international tax reform better than expected: OECD [Press release]. <https://www.oecd.org/newsroom>
- Opoku-Afriyie, P. (2019). Small and medium scale enterprises and job creation. *The International Journal of Business & Management*, 7(8), 163. <https://doi.org/10.24940/theijbm/2019/v7/i8/BM1908-044>
- Oxfam. (n.d.). Inequality in Indonesia: Millions kept in poverty. Oxfam International. Retrieved December 1, 2024, from <https://www.oxfam.org/en/inequality-indonesia-millions-kept-poverty>
- Salma. (2023, September 21). Study reveals social protection and education key to reducing poverty, inequality in Indonesia [Doctoral dissertation]. Universitas Gadjah Mada. Faculty Corner. <https://news.ugm.ac.id>
- Timilsina, G., Stern, D. I., & Das, D. K. (2023). Physical infrastructure and economic growth. *Applied Economics*, 56(18), 2142–2157. <https://doi.org/10.1080/00036846.2023.2184461>
- Universitas Gadjah Mada. (2024). The impact of fiscal policy on Indonesia's economy. <https://feb.ugm.ac.id/news/the-impact-of-fiscal-policy-on-indonesia-economy>
- Retnowati, D., Purnomo, S. D., Jati, D., Zumaeroh, Z., Adhitya, B., Fatmawati, A., & Kencana, H. (2024). Fiscal policy, monetary policy and economic growth in Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 40(1). <https://doi.org/10.29313/mimbar.vi.3424>
- World Bank, & Badan Kebijakan Fiskal (BKF) of the Ministry of Finance. (2020). Revisiting the impact of government spending & taxes on poverty & inequality in Indonesia. *Poverty and Equity Global Practice of the World Bank*.
- Yılmaz, S. Ç. (2023). Başlık makale. *Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi / Journal of Management and Economics Research*, 21(3), 58-72. <https://doi.org/10.11611/yead.1316839>
- Zakaria, S. (2024). The effects of fiscal policy and monetary policy on borrowing costs and credit access for SMEs: An empirical study. *ATESTASI*, 7(1), Article 757.